****

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**FGD Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dalam Rangka Penyusunan Proposal Penelitian tentang**

**“PENGELOLAAN PELABUHAN DI INDONESIA: ASPEK KEBIJAKAN, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN”**

Jakarta, 1 Februari 2019

Yang menjadi dasar dari pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Indonesia adalah Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagai dasar kepelabuhanan secara nasional dan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) sebagai dasar pembangunan dan pengembangan masing-masing pelabuhan.

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, kebijakan pelabuhan nasional diarahkan dalam upaya mendorong investasi swasta; mendorong persaingan; pemberdayaan peran penyelenggara pelabuhan; terwujudnya integrasi perencanaan; menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat serta fleksibel; mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman, terjamin serta optimal; meningkatkan perlindungan lingkungan maritim; dan mengembangkan sumber daya manusia.

“Adapun tantangan pengembangan pelabuhan di Indonesia dalam hal kebijakan institusional adalah tumpang tindih kebijakan; integrasi antar stakeholder; transportasi laut bersifat multidimensi; dan ego sektoral. Pengembangan pelabuhan yang optimal dibangun terintegrasi dengan pengembangan wilayah. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik melalui kebijakan, regulasi dan anggaran. Dukungan kebijakan dan regulasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa komitmen untuk menjamin pelaksanaan rencana pengembangan berjalan terintegrasi.”

***(Capt. Wisnu Handoko)***